

Prosiding Seminar dan Call For Paper  
20-21 Oktober 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,  
Sidoarjo - Indonesia

---

## **Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Wisata Di Kawasan Bandung Utara**

Meria Octavianti  
Slamet Mulyana

Program Studi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran  
email : meria.octavianti@unpad.ac.id; slamet.mulyana@unpad.ac.id

### **Abstrak**

Bandung Utara termasuk adalah kawasan resapan air di wilayah Kota Bandung. Selain kawasan resapan air, Bandung Utara juga dikembangkan sebagai kawasan lindung, konservasi, dan destinasi wisata baru bagi masyarakat. Penelitian ini berupaya menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di sekitar tempat tinggal yang beralih fungsi menjadi destinasi wisata di Kawasan Bandung Utara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui observasi pada berbagai bentuk partisipasi masyarakat di beberapa lokasi hutan wisata serta wawancara kepada ADM dan Humas Perum Perhutani KPH Bandung Utara, masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah hutan wisata, dan pengunjung yang datang ke hutan wisata di Bandung Utara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur pada berbagai dokumen yang terkait dengan topik yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan wisata di Kawasan Bandung Utara terimplemetasikan pada "konsep berbagi". Artinya, masyarakat bersinergi dengan berbagai pihak yang terkait pengelolaan hutan wisata seperti Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Perum Perhutani KPH Bandung Utara, pemerintah desa, dan para *stakeholder* lainnya.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, hutan wisata, kawasan Bandung Utara

### ***Community Participation In Forest Management In North Bandung***

#### ***Abstract***

*North Bandung is a water catchment area in Bandung. In addition to the water catchment area, North Bandung is also developed as a protected area, conservation, and a new tourist destination for the community. This research seeks to analyze the form of community participation in forest management around the residence that turned the function into a tourist destination in North Bandung area. This research method is using case study approach. Primary data obtained through observation on various forms of community participation in some tourist forest locations and interviews to ADM and Public Relations Perum Perhutani KPH North Bandung, people living in the vicinity of forest forests, and visitors who come to forest tours in North Bandung. Secondary data were obtained from literature studies on various documents related to the topic studied. The results showed that the form of community participation in the management of tourism forests in North Bandung area implemented in "sharing concept". That is, the community synergize with various parties related to the management of forest tourism such as Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Perum Perhutani KPH North Bandung, the village government, and other stakeholders. Keywords: community participation, forest tourism, North Bandung area*

## Pendahuluan

Secara umum, hutan memiliki fungsi yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan<sup>16</sup>. Menurut Suparmoko (1997), hutan merupakan asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang didominasi oleh pohon-pohonan dengan luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi tertentu. Suparmoko juga memaparkan mengenai fungsi hutan, yaitu untuk (1) mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah, (2) menyediakan hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi, (3) melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik, (4) memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan, dan taman wisata, serta sebagai laboratorium untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata, (5) merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional.

Melihat banyaknya manfaat dari keberadaan hutan, maka sudah sepatutnya permasalahan yang terjadi karena penanganan yang kurang tepat di wilayah hutan, menjadi perhatian banyak pihak. Berkurangnya jumlah hutan di daerah Jawa Barat, menjadi satu masalah yang penting dan harus segera diatasi. Provinsi Jawa Barat, ternyata dari sisi luasan hutan, pada tahun 2016 termasuk ke dalam kawasan yang paling kritis di Indonesia. Dimana luas hutan yang tersisa di Jawa Barat saat ini hanya sebesar 13%, jauh dari standar minimal yang ditetapkan pemerintah yaitu luas minimal 30% dari luas wilayah<sup>17</sup>. Pengurangan luas hutan di Jawa Barat ini salah satunya adalah dikarenakan semakin meningkatnya pengalih fungsian lahan hutan konservasi menjadi lahan pertambangan mineral dan panas bumi, pariwisata, kebakaran, penebangan liar dan lain-lain.

Kawasan Bandung Utara sendiri merupakan wilayah krusial di daerah Bandung, yang notabene merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Dinyatakan sebagai daerah yang krusial dikarenakan Kawasan Bandung Utara merupakan kawasan resapan air yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem alam di wilayah Bandung. Kota Bandung yang bertopografi cekungan, memerlukan banyak hutan yang berfungsi sebagai resapan air. Tetapi, pada kenyataannya, menurut Wakil Administratur Perhutani KPH Bandung Utara Asep Aan Darsana, luas hutan untuk Kawasan Bandung Utara sekarang hanya 10.230 hektare atau hanya sekitar 30% dari total seharusnya luas hutan di wilayah Bandung Utara yang berfungsi sebagai daerah resapan untuk wilayah cekungan Bandung<sup>18</sup>.

Walaupun sudah ditetapkan sebagai sebuah wilayah yang dikembangkan sebagai kawasan lindung dan kawasan konservasi sejak tahun 1982 oleh Surat Keputusan Gubernur No. 181, tetap saja terjadi pengrusakan hutan di Kawasan Bandung Utara.

---

<sup>16</sup> Hutan, jenis hutan, dan manfaatnya. Dikutip dari [dishut.jabarprov.go.id/images/artikel/hutan-jenis-hutan-dan-manfaatnya.doc](http://dishut.jabarprov.go.id/images/artikel/hutan-jenis-hutan-dan-manfaatnya.doc) pada tanggal 10 Januari 2017

<sup>17</sup> Diakses melalui <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/13696> pada tanggal 10 Januari 2017

<sup>18</sup> Hedi Ardia. 2015. Sisa Luas Hutan KBU terbilang Minim. Dikutip dari <http://bandung.bisnis.com/read/20150505/82444/532981/sisa-luas-hutan-kbu-terbilang-minim> pada tanggal 8 Januari 2017

Seperti yang terjadi pada tahun 1998 – 2010, dimana kerusakan hutan di kawasan ini terjadi dikarenakan penjarahan besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah desa hutan itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelestarian hutan harus dilakukan oleh berbagai pihak.

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan merupakan salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam menjalankan pengelolaan hutan di Kawasan Bandung Utara. Diperlukan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelangsungan hutan dan agar hutan tetap memberikan kontribusi yang positif baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan (masyarakat desa hutan). Oleh karena itu, dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan wisata di Kawasan Bandung Utara (KBU).

### **Tinjauan Pustaka**

Hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang kehutanan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan<sup>19</sup>. Sedangkan menurut Suparmoko (1997), hutan merupakan asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang didominasi oleh pohon-pohonan dengan luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi tertentu. Suparmoko juga memaparkan mengenai fungsi hutan, yaitu untuk : (1) mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah, (2) menyediakan hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi, (3) melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik, (4) memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan, dan taman wisata, serta sebagai laboratorium untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata, (4) merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional.

Berikut merupakan jenis-jenis hutan di Indonesia dilihat dari sisi fungsi hutan menurut Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, yaitu (1) Hutan Lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. (2) Hutan Konservasi. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas : (a) Hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistemnya serta berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Kawasan hutan suaka alam terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, (b) Kawasan hutan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan

---

<sup>19</sup> Hutan, jenis hutan, dan manfaatnya. Dikutip dari [dishut.jabarprov.go.id/images/artikel/hutan-jenis-hutan-dan-manfaatnya.doc](http://dishut.jabarprov.go.id/images/artikel/hutan-jenis-hutan-dan-manfaatnya.doc) pada tanggal 10 Januari 2017

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman hutan raya (TAHURA) dan taman wisata alam. (3) Hutan Produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya serta pembangunan, industri, dan ekspor pada khususnya. Hutan produksi dibagi menjadi tiga, yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), dan hutan produksi yang dapat dikonversikan (HPK).

## Metode

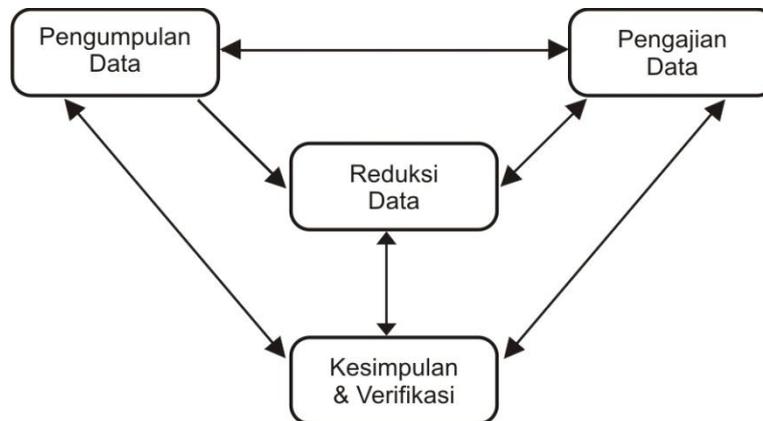
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini berusaha memberikan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai bentuk partisipasi masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan wisata yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Mulyana (2002) bahwa studi kasus merupakan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial. Dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian, peneliti ingin memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Pendekatan ini menganggap kasus sebagai entitas menyeluruh dan bukan sebagai kumpulan bagian-bagian atau kumpulan skor mengenai variabel (Ragin dalam Mulyana, 2002). Sehingga studi kasus bersifat holistik dan *multisources*. Oleh karena itu peneliti berusaha mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terkait dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan studi literatur. Observasi dilakukan pada sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa lokasi hutan wisata di wilayah Bandung Utara. Wawancara dilakukan kepada beberapa masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan juga pada pihak Perhutani KPH Bandung Utara. Observasi dan wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data primer dalam penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur yang dilakukan penulis pada berbagai dokumen yang terkait dengan topik yang dikaji.

Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan *interactive model* seperti yang digambarkan dalam bagan di bawah ini :

## Bagan 1

### Komponen Analisis data Model Interaktif (*Interactive Model*)



Sumber: Matthew B. Miles & Michael A. Huberman (1992) Analisis Data Kualitatif UI Press Jakarta Hlm. 20 dalam Agus Salim (2001: 22)

Dari bagan di atas tergambar bahwa analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu (1) proses pemilihan, yaitu pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan atau yang biasa dikenal dengan reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*data display*), yaitu mendeskripsikan kumpulan informasi yang telah tersusun, untuk selanjutnya dilakukan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid dan kokoh.

## Hasil dan Pembahasan

### *Keberadaan Perhutani KPH Bandung Utara Dalam Pengembangan Hutan Wisata di Kawasan Bandung Utara*

Perhutani memiliki peran dalam sistem perekonomian nasional yang mendukung sistem kelestarian lingkungan dan sistem sosial budaya, khususnya dalam memberdayakan masyarakat di sekitar hutan, agar mereka bisa merasakan manfaat dari keberadaan hutan. Berdasarkan pada PP Nomor 72 Tahun 2010 maksud dan tujuan dari Perhutani adalah untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam rangka mengelola hutan dan hasil hutan ini, Perhutani mengajak masyarakat untuk turut andil dalam pengembangan wilayah hutan sebagai sebuah

tempat wisata dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat diajak untuk merasa memiliki hutan di sekitar tempat tinggalnya, sehingga mereka dapat terlibat dalam pengelolaan dan pengamanan hutan dari masalah penjarahan.

Pengelolaan hutan secara berkelanjutan sangat diperlukan agar hutan tetap lestari. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, menurut *International Tropical Timber Organization* (2005) dalam Udiansyah (2009), merupakan proses mengelola hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan tertentu yang jelas dalam menghasilkan barang dan jasa hutan yang diperlukan secara berkelanjutan, tanpa adanya pengurangan terhadap nilai dan produktivitas hutan di masa yang akan datang dan tanpa adanya dampak yang tidak diharapkan lingkungan fisik dan sosial. Definisi tersebut menunjukkan bahwa hutan yang dikelola secara berkelanjutan, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, 1) produksi bukan hanya kayu tetapi juga jasa, 2) produktivitas dan nilai hutan tidak berkurang, serta 3) tidak ada dampak terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar hutan tersebut. Pengelolaan hutan memerlukan perencanaan agar tercapai hutan yang berkelanjutan. Perencanaan hutan meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan. Perencanaan dan pengelolaan hutan tersebut memerlukan partisipasi dari berbagai pihak. Selain Perhutani, masyarakat, aparat desa dan para *stakeholder* lainnya juga perlu bersatu untuk bisa bersama-sama memikirkan keberadaan hutan secara berkelanjutan.

Wismo Tri Kancono, yang pada saat itu menjabat selaku Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan Bandung Utara Perum Perhutani menyatakan bahwa untuk memperoleh peluang peningkatan pendapatan bagi hasil, masyarakat desa hutan yang tergabung pada LMDH setempat diajak mampu mengembangkan potensi wisata di wilayahnya masing-masing. Pengembangan objek wisata merupakan salah satu ikhtiar yang digenjut KPH Bandung Utara untuk mendongkrak pendapatan dari sektor hasil hutan bukan kayu. Hal tersebut yang menjadi salah satu pendorong munculnya banyak hutan yang dikelola menjadi sebuah tempat wisata baru yang menarik pengunjung untuk datang dan menikmati keindahan alam dari hutan di Kawasan Bandung Utara (KBU). Seiring dengan peningkatan perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar daerah hutan wisata, kelestarian dan keindahan hutan pun semakin terjaga dengan munculnya hutan-hutan wisata. Puncak Bintang di Kecamatan Cimenyan, PAL 16 di Kecamatan Cikole, Geger Bintang Matahari di Kecamatan Lembang, Air Terjun Pelangi di Kecamatan Parongpog, merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hutan di Bandung Utara yang dijadikan hutan wisata oleh kolaborasi dari Perhutani, masyarakat hutan desa yang dalam hal ini diwakili oleh LMDH, aparat desa dan para *stakeholder* lainnya.

Perhutani sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan mengemban tugas serta wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH), secara teknis mendapatkan beberapa hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Banyak pihak yang harus dirangkul dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan aspek produksi/ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan.

Dalam operasionalnya, Perhutani bekerja di bawah koordinasi Kementerian BUMN dengan bimbingan teknis dari Departemen Kehutanan. Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Perhutani mengalami beberapa hambatan. Banyak tekanan yang diterima

pihak Perhutani dari masyarakat yang tinggal di sekitaran hutan milik Perhutani. Tekanan-tekanan tersebut menjadi kendala Perhutani dalam upaya pelestarian dan pengembangan hutan wisata di Kawasan Bandung Utara. Tekanan-tekanan tersebut menjadi hambatan yang harus diatasi terlebih dahulu agar program yang dicanangkan sebagai upaya pelestarian dan pengembangan hutan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memperoleh hasil yang maksimal.

Pengelolaan hutan di Kawasan Bandung Utara, tidak bisa hanya dilakukan oleh Perhutani KPH Bandung Utara saja, tetapi diperlukan sinergi yang aktif dengan masyarakat desa hutan yang dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan juga para *stakeholder* lainnya. Sinergitas dapat muncul apabila permasalahan-permasalahan mendasar telah disadari dan diatasi. Beberapa permasalahan yang muncul dari upaya pelestarian dan pengembangan hutan wisata di Kawasan Bandung Utara secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam 3 faktor utama, yaitu (1) faktor personal, (2) faktor ekonomi, dan (3) faktor budaya.

Faktor personal yang menjadi permasalahan utama adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa hutan di Kawasan Bandung Utara. Walaupun secara jarak, lokasi desa hutan di Kawasan Bandung Utara tidak terlalu jauh dengan wilayah perkotaan dan jarak menuju sekolah pun tidak terlalu jauh, tetapi secara kenyataan tingkat pendidikan masyarakat desa hutan ini masih rendah. Masih banyak masyarakat yang hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat dasar. Hal tersebut berimplikasi pada mata pencaharian sehari-harinya dan tingkat ekonomi keluarga. Selain itu, pola pikir mereka pun menjadi tertutup akan perkembangan zaman.

Faktor yang kedua adalah tingkat perekonomian masyarakat yang rendah. Dikarenakan tingkat pendidikannya rendah maka hal tersebut berimplikasi pada rendahnya pendapatan yang diperoleh untuk setiap bulannya. Rendahnya tingkat pendapatan, menjadi salah satu alasan mereka melakukan hal-hal yang di luar apa yang diperbolehkan, seperti penebangan liar dan pembukaan hutan untuk dijadikan lahan berkebun.

Faktor yang ketiga adalah faktor budaya yang mereka anut. Kebanyakan dari masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah hutan Perhutani, walaupun memiliki tingkat pendidikan dan perekonomian yang rendah, tetapi mereka memiliki "*gengsi*" yang tinggi. Banyak dari mereka, terutama yang masih muda, enggan untuk bekerja melestarikan dan memberdayakan hutan. Mereka lebih memilih untuk menjual lahan yang mereka miliki untuk dapat pergi dan bekerja di Kota Bandung. Hal tersebut yang menyebabkan banyak lahan di Wilayah Bandung Utara yang akhirnya dikelola dan dikembangkan oleh pengembang yang datang dari luar wilayah tersebut. Kondisi tersebut yang menjadikan masyarakat asli di wilayah tersebut merasa terasingkan di wilayahnya sendiri.

Ketiga faktor penyebab permasalahan di atas haruslah dicarikan solusinya. Perhutani KPH Bandung Utara berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan beberapa upaya berupa pendekatan personal yang disesuaikan dengan karakter masyarakat di wilayah tersebut. Sinergitas antara Perhutani dan masyarakat yang tinggal di desa hutan menjadi hal penting yang harus terus dibina dan dipertahankan dalam pengelolaan hutan wisata sebagai salah satu bentuk menjaga kelestarian hutan.

## **Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Hutan Wisata di Kawasan Bandung Utara**

Menurut Uphoff (1985) partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengembangan sebuah program, dibagi pada empat jenis yang berbeda, yaitu (1) partisipasi dalam pelaksanaan, dimana masyarakat secara aktif dimobilisasi untuk mengambil bagian dalam aktualisasi program dan mereka diberi tanggung jawab untuk mengatur tugas-tugas tertentu, (2) partisipasi dalam evaluasi, dimana setelah selesainya program, masyarakat diajak untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dari program yang telah dilaksanakan, (3) partisipasi dalam manfaat, dimana masyarakat dapat mengambil bagian dalam menikmati hasil dari program yang telah dilakukan, dan (4) partisipasi dalam pengambilan keputusan, dimana masyarakat diajak untuk memulai dan mendiskusikan konsep dari program yang akan dilaksanakan. Dalam konteks pelestarian dan pengembangan hutan wisata di Kawasan Bandung Utara, keempat jenis partisipasi yang disebutkan tersebut, dilakukan oleh LMHD sebagai lembaga masyarakat desa hutan di Kawasan Bandung Utara. LMHD berpartisipasi dalam pelaksanaan, evaluasi, manfaat, dan pengambilan keputusan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Perhutani KPH Bandung Utara, berdampak pada perubahan perilaku para perwakilan masyarakat desa hutan yang tergabung dalam LMDH. Mereka yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan mengenai bagaimana cara mengembangkan wilayah hutan di sekitar tempat tinggal mereka, akhirnya menjadi tahu cara yang tepat dengan tidak menghilangkan fungsi hutan yang sesungguhnya. Selain itu, mereka yang awalnya tidak memiliki keinginan untuk mengembangkan hutan yang ada di sekitar tempat tinggalnya, menjadi mau untuk memulai dan membuat konsep yang paling cocok dan memberikan hasil yang terbaik. Kemudian pada akhirnya, mereka yang awalnya tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan keinginannya itu, menjadi mampu untuk merealisasikannya.

Menurut Margono Slamet (1985) bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok, yaitu: (1) adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi, (2) adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, dan (3) adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan wisata di Kawasan Bandung Utara terlihat dari implementasi konsep “berbagi” yang dikembangkan oleh Perhutani dan juga masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Konsep “berbagi” ini terbagi menjadi berbagi ruang, berbagi peran, berbagi waktu, dan berbagi hasil. Dalam menjalankan konsep “berbagi” ini, masyarakat bersinergi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan wisata seperti Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Perum Perhutani KPH Bandung Utara, Aparatur Pemerintah Desa, dan para *stakeholder* lainnya.

“**Berbagi ruang**” dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat dari hutan wisata. Secara fisik, Perhutani memiliki ruang yang merupakan daerah kekuasaannya, begitu pula dengan masyarakat. Akses menuju wilayah hutan yang menjadi kekuasaan Perhutani, pastilah melalui daerah yang dikuasi oleh masyarakat. Kondisi seperti ini, mengharuskan adanya pembagian ruang bersama. Rencana pengembangan hutan wisata sebaik apapun, tanpa didukung oleh akses jalan masuk yang baik dan juga fasilitas pendukung yang lengkap, maka tidak akan mampu merealisasikan rencana tersebut dengan baik. Masyarakat berbagi ruang dengan Perhutani, dalam bentuk ruang imajiner. Walaupun secara fisik, ruangan tersebut terpisah kepemilikan, tetapi secara imajiner,

ruang tersebut merupakan ruang milik bersama, yang dikelola secara bersama-sama untuk kebaikan bersama. Bentuk konkrit dari konsepsi berbagi ruang terlihat saat masyarakat desa hutan, di bawah pengawasan LMDH, dapat memasuki wilayah Perhutani yang dijadikan hutan wisata dan dapat berpartisipasi di wilayah tersebut. Begitu pula bentuk konkrit yang diperoleh Perhutani dari pembagian ruang yang diberikan oleh masyarakat, dalam bentuk pembukaan jalan desa untuk akses menuju hutan wisata.

“**Berbagi peran**” terlihat dari pengelolaan hutan wisata yang dilakukan secara bersama-sama, baik oleh Perhutani sebagai pemilik hutan wisata, masyarakat, aparatur desa, dan juga para *stakeholder* lainnya. Pembagian peran dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip pelestarian hutan. Perhutani tidak memperbolehkan masyarakat desa hutan untuk berjualan di dalam lokasi hutan wisata, untuk tetap menjaga kebersihan dan kealamian hutan. Tetapi sebagai kompensasinya, Perhutani mengizinkan para pengunjung yang masuk ke wilayah hutan wisata, untuk bisa keluar masuk wilayah, dan membeli makanan dari luar wilayah hutan wisata. Dengan begitu, masyarakat desa hutan dapat membuka usaha berjualan makanan di luar lokasi hutan wisata. Selain berjualan, masyarakat desa hutan juga diberikan peran untuk menjadi petugas kebersihan, keamanan, dan ketertiban di wilayah hutan wisata di Kawasan Bandung Utara.

“**Berbagi waktu**” terlihat dari pembagian jam kerja dari masyarakat yang ikut serta dalam mengelola hutan wisata ini. Masyarakat desa hutan memiliki berbagai mata pencaharian utama, yang tidak berhubungan dengan pengembangan hutan wisata. Tetapi mereka diberikan kebebasan oleh Perhutani untuk dapat membagi waktu mereka dalam partisipasinya mengelola hutan wisata.

“**Berbagi hasil**” merupakan bentuk partisipasi yang dianggap paling menguntungkan. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan, termasuk salah satunya hutan wisata, diharapkan mampu memberikan kontribusi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dapat diukur dengan peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 682/KPTS/DIR/2009 Pasal 9 menjelaskan mengenai ketentuan berbagi hasil dalam pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat. Pembagian tersebut ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak. Pembagian tersebut sebesar 20% untuk Perhutani (pihak ke-1), 70% untuk masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan wisata (pihak ke-2), 3% untuk LMDH, 3% untuk pemerintah desa, dan 4% untuk mitra kelola (Bahruzin:2014). Pembagian seperti itu terbukti mampu meningkatkan IPM masyarakat desa hutan yang tinggal di sekitar hutan wisata di Kawasan Bandung Utara.

## Simpulan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan wisata di Kawasan Bandung Utara terlihat dari implementasi konsep “berbagi” yang dikembangkan oleh Perhutani dan juga masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Konsep “berbagi” ini terbagi menjadi berbagi ruang, berbagi peran, berbagi waktu, dan berbagi hasil. Dimana dalam menjalankan konsep ini, masyarakat bersinergi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan wisata seperti Lembaga

Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Perum Perhutani KPH Bandung Utara, aparaturnya pemerintah desa, dan para *stakeholder* lainnya.

Walaupun partisipasi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan wisata di Kawasan Bandung Utara sudah terlihat, tetapi pada kenyataannya masih saja ada hal yang sampai saat ini masih belum optimal dalam pengelolaan hutan wisata di Kawasan Bandung Utara. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat yang tinggal di sekitar hutan wisata dan juga kesadaran para pengunjung akan masalah kebersihan, menjadi salah satu penyebab pengelolaan hutan wisata menjadi lebih berat. Dimana di satu sisi kelestarian hutan wisata harus tetap dijunjung tinggi, tetapi di sisi lain ada tuntutan untuk mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, yang terkadang itu masih tidak sejalan. Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya menjaga kebersihan hutan dari pihak-pihak yang kompeten masih perlu dilakukan.

### Daftar Pustaka

- Bahruzin. (2014). *Analisis Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara Jawa Barat*. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Mulyana, D. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Perum Perhutani. (2001). *Pedoman pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat*. Online. <http://arupa.or.id/sources/uploads/2012/04/2-SK-Dewan-Pengawas-No.-136-2001-PHBM.pdf>
- Perum Perhutani. (2007). *Pedoman pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat*. Online. <http://arupa.or.id/sources/uploads/2012/04/5-SK-Direksi-No.-268-tahun-2007-PHBM-Plus.pdf>
- PP Menhut. (2014). online. <http://ppkh.dephut.go.id/uploads/attach/P.16-Menhut-II-2014.pdf>
- Salim, A. (2001). *Teori dan paradigma penelitian sosial*. Yogyakarta: Tiara wacana
- Slamet, M. (1985). *Pengantar sosiologi*. Jakarta: CV. Rajawali
- Suparmoko. (1997). *Ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan*. Yogyakarta: BPFE.
- Udiansyah. (2009). *Perencanaan hutan adalah tiang pengelolaan hutan berkelanjutan*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Press.
- Uphoff, N. (1985). *Participatory evaluation of participatory development: A scheme for measuring and monitoring local capacity*. Newyork: Cornell University.